

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasannya, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik melaksanakan tugas bidang kependudukan Pemerintah yang telah disahkan melalui Undang-Undang No 23 tentang Administrasi kependudukan di akhir tahun 2006.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 diatas, kedudukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedang tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik yang dibagikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Dinas kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik yaitu :

.....

2. Penetapan petunjuk teknis kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.
3. Pemberian perijinan/rujukan/sertifikasi, pelaksanaan pelayanan dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.
4. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.
5. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi advokasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi bidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas kewenangan kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.
7. Penyelenggaraan tata usaha kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kewenangan sendiri dimana dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan

6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil daerah. Pada dasarnya Sistem Administrasi Kependudukan merupakan sistem dari Sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Sistem Administrasi Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu sub sistem pendaftaran penduduk, sistem pencatatan sipil dan sub sistem pengelolaan informasi kependudukan.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan

pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dan

Created with

 **nitro**PDF professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

Selain mengurus masalah yang Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Temanggung juga mengurus m akta catatan sipil. Akta-akta catatan sipil perkawinan, akta perceraian, akta ke pengesahan anak, duplikat dan legalisir ak warga yang tinggal di Indonesia baik Warga Negara Asing.

Menyadari perlunya ketersediaan dan semakin mendesaknya pelayanan pengelolaan administrasi kependudukan dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sistem Informasi Administrasi Kependu data kependudukan yang lebih valid dan a 2005 Dinas Kependudukan, Catatan Sip mengalokasikan dana untuk mengadakan SDM guna menunjang pelaksanaan SIAK yang berkaitan dengan administrasi keper program Sistem Informasi Administrasi K

Berdasarkan uraian-uraian di meneliti Pelaksanaan Fungsi Dinas I Pengolahan Data Elektronik dalam Kependudukan di Kabupaten Temanggung

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan

Created with

 nitroPDF professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan demi peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk membuat suatu penelitian maka diperlukan teori atau tinjauan pustaka yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian. Teori adalah suatu ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis antara berbagai gejala/perubahan variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam memahami serta menanggapi masalah yang timbul di dalam bidang tersebut.<sup>2</sup>

Dinamika pembangunan, secara nyata tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala yang timbul. Masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, karena sangat kompleks dan multidimensional. Apabila dikaji lebih jauh, masalah kependudukan yang dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan kepada setiap orang.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan ini bersifat multidimensional yang saling terkait satu sama lain. Salah satu

permasalahan yang dihadapi adalah masalah yang di dalamnya terdapat masalah administrasi kependudukan.

Akta Catatan Sipil adalah merupakan bukti status hukum keberadaan seseorang dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan dan pengesahan anak. Mengingat pentingnya akta catatan sipil tersebut, baik sebagai dokumen pribadi maupun pemerintah dalam rangka pengendalian atau pengawasan kepastian hukum khususnya bagi setiap Warga Negara Indonesia, maka untuk menghindari kerawanan-kerawanan dalam pembuatan akta catatan sipil harus diurus oleh yang berkepentingan sendiri atau keluarganya.

Oleh karena informasi dan data yang tertuang dalam akta catatan sipil tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas peristiwa-peristiwa itu, maka lembaga catatan sipil tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang atau keluarga, sehingga apa yang terjadi dalam keluarga memperoleh bukti yang dapat dipercaya berupa akta catatan sipil.<sup>3</sup> Dari segi hukum administrasi negara bahwa lembaga catatan sipil merupakan salah satu lembaga yang berwenang melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan putusan, yang berlaku mutlak berbentuk akta dan bersifat formal, individual konkrit dan final, dan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
2. Menunjang bagi data perencanaan pembangunan.
3. Pengawasan serta pengendalian orang asing.

Sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapai baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kependudukan diakui bahwa sistem penyelenggaraan catatan sipil dewasa ini sudah tidak memadai lagi untuk menampung atau mengantisipasi permasalahan dan tuntutan kebutuhan yang diakibatkan canggihnya kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi saat ini.

Penyelenggaraan catatan sipil sudah menuntut kecepatan, kebenaran materiil dan keakuratan dalam pelayanannya, sementara sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut masih sangat terbatas dan dilakukan secara manual.

Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah kabupaten/kota antara lain adalah :

1. Pelayanan publik atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialar oleh penduduk, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk.
2. Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan.

Adapun peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan, ialah pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk di kondisi daerah setempat, hal tersebut penting mengingat sangat bervariasi, selain itu data hasil pendaftaran penduduk

berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pada proses perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah dibutuhkan data kependudukan yang akurat dan valid. Data kependudukan merupakan *data base* yang penting dan strategis. Data kependudukan ini terdiri dari :

1. Jumlah penduduk
2. Distribusi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, agama, status perkawinan, kewarganegaraan.
3. Mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, pindah tempat tinggal dan alih kewarganegaraan.

Dengan adanya masalah-masalah tersebut diperlukan adanya suatu penataan administrasi kependudukan selain untuk menunjang terwujudnya sumber informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak/sector pemerintahan juga untuk menunjang suatu kondisi tentram dan tertib, yaitu sebagai salah satu yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional.

Dalam kaitan itu perlu disadari bahwa administrasi kependudukan yang intinya adalah pendaftaran penduduk, selain sebagai salah satu sarana dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban yang memiliki dampak

berguna bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah maupun ditingkat nasional.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan

1. Pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan kependudukan.
2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statis kependudukan.
4. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kepend nasional, dan lokal.
5. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kepe meningkatkan pemberian pelayanan publik dan diskriminas

Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Rep maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wil Indonesia.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pendaftaran penduduk melip tentang penyelenggaraan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu pendaftaran tentang setiap perubahan yang terjadi. Pelaksana penduduk pada setiap penduduk dan penduduk sementara waji kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan diri keluarganya kepada pemerintah daerah setempat. Kewajiba termasuk setiap perubahan yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, pendaftaran penduduk belum dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari segi kelembagaan

Kecilnya organisasi yang menangani pendaftaran penduduk baik ditingkat pusat maupun daerah.

2. Dari segi ketatalaksanaan

Sistem penyelenggaraan pendaftaran penduduk selama ini tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang semakin kompleks.

3. Dari segi sumber daya manusia

- a. Kurangnya tenaga pelaksanaan baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang mengenai arti pentingnya administrasi kependudukan baik yang terlihat dari pemanfaatan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun pelaporan setiap terjadi perubahan oleh kepala keluarga atau anggota keluarga yang menyangkut lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).<sup>5</sup>

Informasi data yang lengkap, akurat dan terpercaya merupakan data penunjang bagi penyusunan program pembangunan di berbagai bidang, dengan kata lain mempunyai aspek yang sangat luas dan erat sekali hubungannya dengan pengambilan suatu keputusan dan peraturan

yang ditetapkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan kependudukan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penduduk adalah subyek pembangunan.

Untuk meminimalkan kelemahan dalam hal administrasi kependudukan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar dapat memudahkan masyarakat memahami Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi operasional untuk tiap *item*, yaitu :

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. Perubahan data menjadi informasi dilakukan oleh pengolah informasi. Pengolah informasi adalah suatu program komputer yang dapat meliputi elemen-elemen komputer, elemen-elemen manusia, atau kombinasi. <sup>6</sup>

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan perencanaan, penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki sistem *data base* kependudukan yang menunjang administrasi kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembangunan suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan





Kependudukan. Kependudukan sebagai salah satu upaya mewujudkan pelayanan prima di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memuaskan masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung guna mendapatkan data empiris yang sesuai dengan kenyataan. Penelitian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara langsung

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data di atas maka diperlukan data primer dan data

Kependudukan. Kependudukan sebagai salah satu upaya mewujudkan pelayanan prima di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memuaskan masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung guna mendapatkan data empiris yang sesuai dengan kenyataan. Penelitian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara langsung

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data di atas maka digunakan data primer dan data

a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan angket. Responden yang dimaksud disini adalah obyek penelitian yang meliputi orang-orang yang terlibat dalam masalah kependudukan baik intern dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

Responden disini meliputi :

- 1). Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.
- 2). Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.
- 3). Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.
- 4). Staff di lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

b. Data Sekunder diperoleh dengan studi pustaka yaitu suatu cara untuk mencari data dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut, disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan

Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung.

## 5. Analisis Data

Gambaran umum tersebut dianalisis secara analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data pustaka dan lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk meninjau permasalahan dan merumuskan hipotesis